

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang**

Setiap organisasi baik organisasi swasta maupun sektor publik harus memiliki strategi yang baik dalam mengontrol sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi harus digunakan secara optimal, efisien dan efektif sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Dalam operasional sektor publik, terdapat sistem pengendalian manajemen yang mengatur sumber daya agar digunakan secara efisien dan efektif. Agar sumber daya dapat digunakan secara efisien dan efektif, maka dibutuhkan perencanaan yang cermat agar kegiatan-kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan baik sehingga pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kusniawati & Lahaya, 2017)

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dimana daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Kewenangan luas tersebut tidak berlaku untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah penyusunan anggaran. Anggaran sebagai alat perencanaan, merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintahan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi ke dalam dimensi kuantitatif dan waktu,

serta mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:48) “Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja”.

Menurut (Badriah, 2020;65) “Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan standar biaya suatu program atau kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional yang dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Anggaran daerah disusun eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh legislatif sebagai prinsipal. Namun, penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong agen untuk melakukan *budgetary slack*”.

Menurut Anthony dan Govindarajan, (2006:85) dalam (Fadhli & Indriani, 2019) . *budgetary slack* (Senjangan Anggaran) adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi. Artinya ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya, bawahan cenderung mengecilkan kapabilitas produktifnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa anggaran merupakan dokumen estimasi kinerja yang berisi penerimaan dan pengeluaran yang dicapai untuk suatu periode tertentu. Anggaran berbasis kinerja adalah standar biaya suatu kegiatan dengan tujuan agar anggaran lebih rasional

yang dapat meminimalisir terjadinya anggaran yang tidak efisien. Tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong agen untuk melakukan *budgetary slack* yaitu perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dan jumlah yang terbaik dari organisasi.

Kemungkinan terciptanya *budgetary slack* dalam pemerintah daerah cukup besar, karena kegiatan penganggaran (mulai dari klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan) melibatkan seluruh pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Badriah, 2020). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kumpulan dari anggaran banyak satuan kerja (Dinas, Badan, Kantor, dan Sekretariat) sangat tergantung pada kebutuhan di setiap satuan kerja.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kota Tidore Kepulauan. Dalam pemerintah kota tidore kepulauan masih terjadi kesenjangan anggaran, hal ini dapat dilihat pada perbedaan antara anggaran pendapatan dan realisasi dan anggaran belanja dan realisasinya. Berikut merupakan laporan realisasi anggaran kota Tidore Kepulauan ditunjukkan pada tabel 1.1. sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Pendapatan dan Realisasi kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020**

| Tahun | Pendapatan          | Realisasi           | persentase |
|-------|---------------------|---------------------|------------|
| 2016  | Rp. 820.545.791.325 | Rp. 768.561.845.221 | 93,66%     |
| 2017  | Rp. 788.502.701.410 | Rp. 773.806.179.371 | 98,14%     |
| 2018  | Rp. 867.746.252.506 | Rp. 861.537.337.720 | 99,28%     |
| 2019  | Rp. 919.020.980.586 | Rp. 914.186.293.107 | 99,47%     |
| 2020  | Rp. 874.080.209.104 | Rp .906.027.787.630 | 103,65%    |

*Sumber: BPKAD Kota Tidore Kepulauan*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan perbedaan antara pendapatan dan realisasi anggaran kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2020. Laporan realisasi anggaran pemerintah kota Tidore Kepulauan tahun 2016 menunjukkan pendapatan sebesar Rp.820.545.791.325 dan realisasi anggaran sebesar Rp.768.561.845.221, artinya pada tahun 2016 realisasi anggaran pendapata sebesar 93,66% dan sisanya 6.34 yang belum terealisasi. Pada tahun 2017 pendapatan kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 788.502.701.410 dan realisasinya sebesar Rp.773.806.179.371, artinya pada tahun 2017 realisasi anggaran pendapata sebesar 98,14% dan sisanya 1,86 yang belum terealisasi.

Laporan realisasi anggaran kota Tidore Kepulauan tahun 2018 menunjukkan anggaran pendapatan sebesar Rp.867.746.252.506 dan realisasinya sebesar Rp.861.537.337.720, artinya pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapata sebesar 99,28% dan sisanya 0,72 yang belum terealisasi. Tahun 2019 anggaran pendapatan sebesar Rp.919.020.980.586 dan realisasinya sebesar Rp.914.186.293.107 artinya pada tahun 2019 realisasi anggaran pendapata sebesar 99,47% dan sisanya 0,53 yang belum terealisasi. Pada Tahun 2020 pendapatan pemerintah kota Tidore Kepulauan sebesar Rp.874.080.209.104 dan realisasinya sebesar Rp.906.027.787.630 artinya pada tahun 2020 realisasi anggaran pendapata sebesar 103,65% dan mengalami kenaikan realisasi sebesar 3,65%. Dari data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terjadinya selisihan anggaran pada pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan.

Selain perbedaan pendapatan dan realisasi pada Tabel 1.1 diatas, terdapat perbedaan belanja dan realisasi pada pemerintah kota Tidore Kepulauan. Perbedaan belanja dan realisasinya ditampilkan dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1. 2**

**Belanja dan Realisasi kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020**

| Tahun | Belanja             | Realisasi           | Persentase |
|-------|---------------------|---------------------|------------|
| 2016  | Rp. 803.335.626.814 | Rp. 741.079.037.165 | 92,25%     |
| 2017  | Rp. 691.703.303.755 | Rp. 641.682.951.448 | 92,76%     |
| 2018  | Rp. 799.807.244.050 | Rp. 762.092.301.940 | 95,28%     |
| 2019  | Rp.839.284.519.027  | Rp. 799.164.134.606 | 95,22%     |
| 2020  | Rp.814.974.790.353  | Rp. 743.341.490.700 | 91,21%     |

*Sumber: BPKAD Kota Tidore Kepulauan*

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan belanja kota tidore kepulauan. Laporan realisasi anggaran pemerintah kota Tidore Kepulauan tahun 2016 menunjukkan anggaran belanja sebesar Rp.803.335.626.814 dan realisasinya sebesar Rp.741.079.037.165 artinya pada tahun 2016 realisasi anggaran belanja sebesar 92,25% yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja sudah teralisasi. Jika dibandingkan, perbedaan pendapatan dan belanja tahun 2016 adalah sebesar 0,98%. Pada tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp.691.703.303.755 dan realisasinya sebesar Rp.773.806.179.371, artinya pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja sebesar 98,14% yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja sudah teralisasi.%. Perbedaan pendapatan dan belanja tahun 2017 sebesar 0,88%.

Laporan realisasi anggaran kota Tidore Kepulauan tahun 2018 menunjukkan anggaran belanja sebesar Rp.799.807.244.050 dan realisasinya sebesar Rp.762.092.301.940 artinya pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja sebesar 95,28% yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja sudah teralisasi. Perbedaan pendapatan dan belanja tahun 2018 sebesar 0,92%. Tahun 2019 anggaran belanja sebesar Rp.839.284.519.027 dan realisasinya sebesar Rp.799.164.134.606 artinya pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja sebesar 92,22% yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja sudah teralisasi. Perbedaan pendapatan dan belanja tahun

2019 sebesar 0,91%. Pada Tahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp.814.974.790.353 dan realisasinya Rp.743.341.490.700 artinya pada tahun 2020 realisasi anggaran belanja sebesar 91,21% yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja sudah teralisasi. Perbedaan pendapatan dan belanja tahun 2020 sebesar 0,93%. Dari data tersebut, peneliti menduga bahwa terjadinya senjangan anggaran pada pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan data tersebut, terjadi perbedaan antara pendapatan dan realisasi maupun perbedaan antara belanja dan realisasi, maka peneliti menduga bahwa terjadinya senjangan anggaran pada pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan.

Selain perbedaan pendapatan dan realisasi terhadap belanja diatas, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah kota tidore kepulauan masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Hal ini karena pendapatan asli daerah(PAD) masih rendah. Ketergantungan tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran pendapatan yang ditunjukkan dalam tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1. 3**

**Perbedaaan PAD dan Pendapatan kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020**

| Tahun | PAD               | Pendapatan          | Persentase |
|-------|-------------------|---------------------|------------|
| 2016  | Rp.41.662.243.410 | Rp. 820.545.791.325 | 5,07%      |
| 2017  | Rp.60.855.811.410 | Rp. 788.502.701.410 | 7,71%      |
| 2018  | Rp.60.096.952.506 | Rp.867.746.252.506  | 6,92%      |
| 2019  | Rp.62.669.911.660 | Rp.919.020.980.586  | 6,81%      |
| 2020  | Rp.69.345.279.187 | Rp.874.080.209.104  | 7,91%      |

*Sumber: BPKAD Kota tidore kepulauan*

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, rasio kemandirian untuk pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebesar 5,07%, artinya anggaran pendapatan pemerintah kota tidore kepulauan tahun 2016 sebagian

besar masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yaitu sebesar 94,93%. Tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 7,71%, artinya terjadi peningkatan pada pendapatan daerah kota tidore kepulauan dibandingkan pada tahun 2016, tetapi ketergantungan pemerintah daerah masih cukup besar yaitu 92,29% dana transfer dari pemerintah pusat atau pihak ketiga. Pada tahun 2018 sebesar persentase tingkat kemandirian menurun sebesar 6,92% dari tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 anggaran pendapatan pemerintah kota tidore kepulauan masih bergantung pada dana transfer sebesar 93,04%

Tahun 2019 persentase selisih anggaran pendapatan asli daerah dengan anggaran pendapatan pemerintah kota tidore kepulauan sebesar 6,81%, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,11% dibandingkan dengan tahun 2018 sehingga anggaran pendapatan pemerintah kota tidore kepulauan masih bergantung pada dana transfer sebesar 93,19%. dan pada tahun 2020 persentase antara pendapatan asli daerah dengan anggaran sebesar 7,91%, artinya terjadi peningkatan sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun 2019, sehingga anggaran pendapatan pemerintah kota tidore kepulauan masih bergantung pada dana transfer sebesar 92,09%. Berdasarkan data tabel 1.3 perbedaan pendapatan asli daerah dengan anggaran pendapatan penulis menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian sangat rendah, artinya tingkat ketergantungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) masih sangat tinggi.

Praktik senjangan anggaran dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi dengan adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan principal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan

tingkat kemakmuran yang dikehendaknya (Hikmawahwati et al., 2018). Menurut (Halim dan Kusufi, 2014:162) “Konsep keagenan adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Principal mempekerjakan *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, namun *principal* dan *agent* mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Dalam perusahaan (organisasi sektor bisnis), pemegang saham dan atasan sebagai *principal* dan *chief executive officer (CEO)* dan bawahan sebagai agen mereka. Dalam organisasi sektor publik, atasan bertindak sebagai *principal* dan bawahan sebagai *agent* mereka”.

Pertama kali diperkenalkan dalam literatur ekonomi informasi untuk menjelaskan sebuah model teoritikal atas hubungan antara satu pihak (*principal*) yang mendelegasikan suatu pekerjaan kepada pihak lain (*agent*). Bawahan dan atasan akan berperilaku positif apabila tujuan pribadi bawahan dan atasan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya bawahan akan berperilaku negatif apabila anggaran tidak diadministrasikan dengan baik, sehingga bawahan dapat menyimpang dari tujuan organisasi. Perilaku disfungsional ini diwujudkan dalam Budget Slack, Warindrani (2006: 99) dalam (Hikmawahwati et al., 2018).

Faktor pertama yang mempengaruhi *budget slack* adalah partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran adalah adanya keikutsertaan para bawahan secara komunikatif dalam proses penyusunan anggaran, dimana informasi yang dibutuhkan para atasan dapat diberikan oleh para bawahan secara aktual sehingga atasan dapat mengambil keputusan yang baik dalam suatu anggaran tanpa mementingkan kepentingan atasan saja tapi juga bawahan dan mencakup organisasi secara keseluruhan (Badriah, 2020)

Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan karena biasanya bawahan cenderung lebih mengetahui informasi yang lebih

banyak mengenai kebutuhan anggaran yang ada dibagiannya (W. A. Sari & Mokhlas, 2018). Namun tingginya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran, akan memicu timbulnya senjangan anggaran yang tinggi. Bawahan akan merasa bertanggung jawab atas anggaran yang telah disusun. Akibatnya bawahan merasa tertekan dan berusaha untuk mencapai target anggaran tersebut dengan lebih mudah, sehingga membuat senjangan anggaran.

Berdasarkan teori keagenan, anggaran partisipatif merupakan proses kerjasama antara agen dan prinsipal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penganggaran daerah. Anggaran daerah disusun oleh eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh legislatif sebagai prinsipal. Makna partisipatif di pemerintahan daerah adalah keterlibatan SKPD dalam penyusunan APBD. Kepala SKPD memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD). RKA-SKPD merupakan dokumen anggaran partisipatif di pemerintah daerah secara internal terkait penentuan alokasi anggaran dan target kinerja dalam RAPBD yang selanjutnya menjadi APBD (Abdullah, 2012) dalam (Umasangadji et al., 2019).

Penelitian(Madjojo, 2017)) dan (Hikmawahwati et al., 2018) menemukan Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Palupi & Sari, 2020) dan (Sanjiwani & Suryanawa, 2020) yang menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap Budgetary Slack. Namun Penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian, (Badriah, 2020) menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap *budgetary slack*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Kusniawati & Lahaya, 2017) juga menemukan

bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *budgetary slack*.

Selain kesenjangan anggaran, komitmen organisasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan anggaran. Menurut Afriadinata (2014) dalam (Hikmawahwati et al., 2018:30) "komitmen organisasi adalah suatu dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi". Jika seseorang dengan komitmen organisasi yang rendah, maka individu tersebut akan berusaha melakukan kesenjangan anggaran agar kinerjanya terlihat baik. Sebaliknya, jika individu memiliki komitmen organisasi tinggi, maka individu tersebut akan mementingkan kepentingan organisasi sehingga kesenjangan anggaran akan rendah.

Kuatnya komitmen organisasi mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman pada organisasi manapun begitupun pada sektor publik. Adanya komitmen organisasi ini mempermudah pihak pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kerja yang optimal. Hal tersebut dikarenakan karena semakin kuat komitmen organisasi yang dimiliki tentu akan mengikat karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diemban, sehingga meminimalisir kecurangan yang tidak diharapkan. Begitu halnya pada proses penganggaran karena karyawan sudah memiliki loyalitas atau komitmen terhadap organisasi, maka organisasi tersebut dapat menghasilkan anggaran yang baik guna menjalankan program kerja yang telah ditentukan dan dapat meminimalisir terjadinya *budgetary slack* (Umasangadji et al., 2019).

Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal serta faktor eksternal. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor internal, dikarenakan komitmen berasal dari dalam diri setiap individu yang kemudian dapat mempengaruhi tindakan yang akan diambil. Sedangkan faktor eksternal dapat mempengaruhi perilaku bawahan, yang dalam hal ini yang menjadi faktor eksternal ialah gaya kepemimpinan seorang atasan dalam memperlakukan bawahannya. Pemimpin yang terlalu kaku dan ketat dalam sebuah organisasi akan menimbulkan tekanan kepada bawahannya yang kemudian akan mendorong bawahan untuk mencari kondisi aman dalam pencapaian kinerja. Sehingga diperlukan pemimpin yang mampu mengontrol kemampuan dan potensi bawahan dalam melaksanakan pekerjaan serta memberikan kepercayaan dan motivasi kepada bawahan dalam pencapaian target anggaran agar dapat meminimalisir terjadinya *budgetary slack* (Palupi & Sari, 2020).

Kriswantini dan Ode, 2017 menemukan bahwa Variabel komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *budgetary slack*. Penelitian (Palupi & Sari, 2020) dan (Sanjiwani & Suryanawa, 2020) menemukan bahwa Komitmen organisasi berpengaruh negatif pada *budgetary slack*. Hal ini berarti meningkatnya tingkat komitmen organisasi, maka semakin rendah tingkat *budgetary slack*. Penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2019) dan (Putra & Mintoyuwono, 2019) yang menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap budget slack.

Selain partisipasi anggaran dan komitmen organisasi, asimetri juga merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan *budget slack*. Asimetri informasi merupakan perbedaan informasi yang

dimiliki manajer tingkat atas dengan manajer tingkat bawah karena adanya perbedaan sumber dan akses atas informasi tersebut. Partisipasi dari bawahan dalam menyusun anggaran dapat memberikan kesempatan untuk memasukkan informasi lokal. Bawahan dapat mengkomunikasikan/mengungkapkan beberapa informasi pribadinya yang mungkin dapat dimasukan dalam anggaran. Disamping itu, bawahan juga dapat menyembunyikan beberapa informasi pribadi sehingga dapat mempengaruhi anggaran semakin tinggi asimetri informasi, maka akan semakin tinggi terjadinya kesenjangan anggaran(Ujianti, 2019).

Ketidaksesuaian informasi yang diperoleh atasan dan bawahan akan mendorong munculnya senjangan anggaran, karena dengan informasi sedikit yang dimiliki oleh atasan, akan mendorong bawahan untuk menyampaikan informasi pribadi dalam penyusunan anggaran. Sehingga besar kemungkinan low manager akan melakukan senjangan anggaran (Kristiawan, 2017).

Perbedaan informasi ini dapat dilihat pada tahun 2019 empat fraksi DPRD Kota Tikep menolak LPP APBD dan Memohon BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Walikota dan Wakil Walikota tahun 2019 diploting dengan angka yang sangat fantastis. Perjalanan dalam daerah Walikota dianggarkan sebesar Rp.550 juta sedangkan Wakil Walikota senilai Rp.750 juta. Pada anggaran perubahan perjalanan dalam daerah Walikota ditambah Rp.350 juta sedangkan Wakil Walikota Rp.200 juta sehingga total perjalanan dalam daerah untuk Walikota Rp.900 juta dan Wakil Walikota Rp.950 juta. Sementara pada laporan realisasi Walikota menghabiskan biaya perjalanan dalam daerah sebesar Rp.603.705.000 sedangkan Wakil Walikota sebesar Rp.732.604.000. Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran perjalanan

dinas dalam daerah, Wakil Walikota diploting lebih besar dari Walikota (Bizlawnews, 2020).

(Priliandan & Astika, 2016) menemukan bahwa variabel informasi asimetri memperkuat pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian (Mahadewi, 2014) juga menemukan bahwa Asimetri informasi terhadap hubungan partisipasi anggaran pada senjangan anggaran memiliki pengaruh positif. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiyastuti et al., 2021) yang menemukan bahwa asimetri informasi tidak memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardianti et al., 2015) variabel asimetri informasi tidak mampu memperkuat pengaruh penganggaran partisipatif pada *budgetary slack*.

Asimetri informasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan antara komitmen organisasi dengan *budget slack*. Komitmen organisasi juga mempengaruhi cara pandang seseorang dalam berperilaku dalam organisasi. Perbedaan penerimaan informasi antara bawahan dan atasan juga menjadi faktor yang dapat memperkuat pengaruh variabel lain dalam menciptakan senjangan anggaran. Senjangan anggaran ini sangat mudah dapat terjadi ketika informasi yang dipunyai bawahan lebih banyak daripada atasan atau informasi yang dimiliki salah satu pihak lebih baik dibandingkan pihak lain.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak agen dengan pihak prinsipal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*). Pihak agen akan berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya untuk memperoleh intensif. Disisi lain pihak

prinsipal (atasan) menginginkan pengembalian yang besar atas investasi yang diberikan. Asimetri informasi memberikan kelonggaran atau peluang kepada para karyawan yang terlibat dalam penyusunan anggaran untuk mempengaruhi anggaran yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan maupun keinginan atasan. Ketika dalam proses negosiasi, penyusun anggaran memiliki peluang dalam menciptakan senjangan anggaran dengan menyampaikan informasi yang bias kepada atasan (Palupi & Sari, 2020)

Selain itu, Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor internal, dikarenakan komitmen berasal dari dalam diri setiap individu yang kemudian dapat memengaruhi tindakan yang akan diambil. Ketika individu memiliki komitmen dalam sebuah instansi tetapi apabila terjadi ketidaksamaan informasi yang diperoleh maka akan mempengaruhi tindakan yang diambil karena Asimetri informasi merupakan salah satu faktor internal individu dalam menentukan perilaku individu itu sendiri.

Penelitian (Anggasta & Murtini, 2014) menemukan bahwa Asimetri informasi bukan menjadi faktor yang dapat memperkuat komitmen organisasi dalam menciptakan senjangan anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kesenjangan anggaran dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi**”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Badriah, 2020) dengan judul “ Pengaruh partisipasi anggaran Terhadap *budgetary slack*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel independen dan variabel asimetri informasi sebagai variabel moderasi.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran ?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kesenjangan anggaran ?
4. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap hubungan antara komitmen organisasi dengan kesenjangan anggaran

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kesenjangan anggaran
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kesenjangan anggaran
3. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kesenjangan anggaran
4. Untuk menganalisis pengaruh asimetri terhadap hubungan antara komitmen organisasi dengan kesenjangan anggaran

## **1. 4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan konsep tentang kesenjangan anggaran (*budget slack*) keuangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan asimetri informasi.

## 2. Bagi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kesenjangan anggaran (*budget slack*) dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi, agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat maupun meningkatkan kinerja internal didalam pemerintahan.